

INFORMASIA



ISTIMEWA

TINGKAT stunting sebagai dampak kurang gizi pada balita di Indonesia melampaui batas yang ditetapkan badan kesehatan dunia (WHO). Kasus stunting banyak ditemukan di daerah dengan kemiskinan tinggi dan tingkat pendidikan yang rendah. Indonesia digadang-gadang menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam beberapa dekade mendatang.

PricewaterhouseCoopers (PWC) memprediksi ekonomi Indonesia masuk dalam lima besar dunia pada 2030, bahkan

menjadi negara keempat dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2050 nanti. Jika itu terjadi, posisi Indonesia hanya akan ada di bawah China, India, dan Amerika Serikat. Prediksi tersebut didasarkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dianggap stabil dan populasi yang besar. Dari komposisi usia penduduk, pada 2030, 70% penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun atau berada dalam masa produktif. Komposisi ini disebut sebagai bonus demografi. Kelompok usia produktif inilah yang

jumlahnya diperkirakan 180 juta jiwa, yang akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional.

Pemerintah mematok target prevalensi stunting 2022 turun 3% melalui konvergensi program intervensi spesifik dan sensitif yang tepat sasaran. Hal ini juga didukung data sasaran yang lebih baik dan terintegrasi, pembentukan TPPS dan penguatan tingkat implementasinya hingga di tingkat rumah tangga melalui posyandu.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, angka prevalensi stunting di Indonesia pada 2021 sebesar 24,4%, atau menurun 6,4% dari angka 30,8% pada 2018.

Setiap kementerian/lem-

baga (K/L) ditargetkan untuk menyusun rencana pencapaian setiap target antara yang menjadi tanggung jawabnya dan memastikan kecukupan dana, sarana, serta kapasitas implementasinya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui holding BUMN farmasi memiliki komitmen dalam pencegahan stunting melalui beragam produk yang dimiliki. PT Pharos Tbk. misalnya, bersama PT Bio Farma (Persero) memberikan edukasi secara langsung pada siswa tentang pentingnya mencegah stunting sejak dini.

Intervensi sejak dini diperlukan untuk memastikan para remaja putri sehat dan terbebas dari anemia, sehingga bisa mencetak generasi penerus bangsa yang bebas stunting, energik dan berprestasi.

Seperti diketahui bahwa kasus stunting menjadi salah satu masalah kesehatan anak dan remaja yang paling disorot oleh pemerintah saat ini.

"Salah satu penyebab stunting adalah anemia pada ibu hamil. Upaya intervensi sebelum terjadinya hal tersebut, yaitu dengan pencegahan anemia sedari dini pada remaja dengan optimalisasi gizi dan konsumsi tablet tambah darah (TTD) secara rutin sekali dalam seminggu," ujar Direktur Pemasaran Pharos, Imelda Alini Pohan, dalam keterangan tertulisnya kemarin.

Dia menyebutkan, sebaran prevalensi stunting di Jawa Barat mencapai 24,5%. Meski prevalensi stunting di Jawa Barat tidak setinggi NTT, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, lantaran jumlah

populasi anak dan remajanya besar, jumlah kasusnya pun menjadi banyak. Berdasarkan data *dashboard* sebaran stunting Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri tahun 2022, sekitar 3,2 juta Balita di Jawa Barat terpantau mengalami stunting.

Hasil survey Nutrition International pada tahun 2018 menemukan kasus anemia-remaja putri di Jawa Barat sebesar 41,93%, sementara cakupan remaja putri yang mendapatkan tablet tambah darah pada tahun 2021 baru 25,2% dan masih di bawah target Provinsi Jawa Barat, yakni 52%.

"Dari hasil survei tersebut, dibutuhkan kolaborasi program dengan berbagai *stakeholders*. Salah satunya yang kami lakukan hari ini di SMAN 1

Purwakarta," tegasnya.

Menteri BUMN Erick Thohir mengajak para milenial, terutama remaja putri lebih aktif dan menjadi bagian penting mengatasi masalah stunting yang masih tinggi di Indonesia. Dengan menjalani hidup sehat, rajin mengonsumsi vitamin penambah darah serta ikut menyosialisasikan pola konsumsi makanan bergizi di masyarakat, gen milenial juga punya peran mengatasi ketimpangan sosial.

Para siswi diharapkan tak hanya meminum tablet tambah darah, tetapi juga bisa berkesinambungan mengubah perilakunya untuk tetap meminum tablet tambah darah secara rutin. Karena dari asupan makanan saja pasti tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan zat besi mereka.

 **antonc**

Ruang Transisi Sesuai dengan Kebutuhan

RUANG transisi pada pintu masuk bangunan atau sering kali disebut *enter chamber* atau kamar depan sudah diaplikasikan sejak arsitektur kuno dan memiliki beberapa fungsi. Untuk menciptakan privasi karena menghalangi interior rumah bagian dalam langsung terlihat dari luar.

Fungsi lain juga mengontrol pertukaran suhu panas atau pun dingin serta kebisingan antara bagian luar dan dalam bangunan. Sering kali dimanfaatkan sebagai area tunggu dan menyambut kedatangan yang dapat membentuk ekspektasi terhadap rumah. Terdapat beberapa tipe ruang transisi yang mungkin sering didengar, yakni *foyer*, *vestibule*, *mudroom* dan *entryway*.

Principal Designer Glare Esther Juwita mengatakan, kebanyakan memang masih sulit membedakan mengangap keempatnya sama. Padahal ada ciri khas masing-masing, seperti *foyer* dalam sebuah hunian biasanya merupakan area di balik pintu depan yang memisahkan bagian luar rumah dengan ruang dalam atau rumah yang lebih *private*.

Foyer dapat berisi area penerimaan tamu, lemari penyimpanan, dan *powder room* untuk menyegarkan diri sebelum menuju ke bagian utama rumah. Terkadang juga dilengkapi hanger

untuk menyimpan pakaian luar seperti jaket juga payung. Sering kali dihiasi dengan cermin dan meja konsol.

"Pada desain tertentu, khususnya rumah berlantai dua, *foyer* ini terdapat tangga menuju ke lantai dua rumah yang dibuat indah dan menarik," jelasnya.

Foyer yang terletak di gedung yang lebih besar seperti gedung apartemen, hotel, dan kantor pada dasarnya adalah lobi atau *entrance hall*. Sama seperti *foyer* rumah, lobi juga merupakan perantara antara outdoor dengan ruangan yang lebih *private*. Namun karena ukurannya yang besar lobi lebih dapat berfungsi ganda sebagai area penerimaan dan area tunggu bahkan dapat menampung restoran, *coffeeshop* hingga toilet.

Vestibule merupakan ruang di antara dua atau lebih bukaan pintu yang berfungsi sebagai ruang transisi antara areal luar dan ruangan dalam rumah yang lebih *private*. *Vestibule* memang mirip dengan *foyer* karena merupakan

pintu masuk ke bagian utama sebuah bangunan tetapi ukurannya lebih kecil dan umumnya lebih tertutup. Tujuan utamanya juga menjadi penyangga, sebagai filter dari kebisingan, debu juga kotoran dan perpindahan suhu serta cuaca ekstrem sehingga dapat menghemat energi.

Vestibule ini juga berfungsi sebagai keamanan terhadap bencana termasuk kebakaran dan banjir dengan bertindak sebagai lapisan perlindungan atau menciptakan jarak antara bagian luar dan interior utama bangunan.

"Tidak hanya pada area masuk utama, *vestibule* juga sering kali di aplikasikan pada bagian rumah yang lebih dalam sebagai area transisi setelah memasuki ruangan tertentu yang lebih *private*, misalnya kamar tidur utama," ungkap Esther.

Vestibule juga lazim terdapat di gedung-gedung yang lebih besar dan lebih mewah seperti bank, hotel, gedung perkantoran, dan restoran. Di bank, *vestibule* biasanya berisi mesin ATM yang tetap diakses walaupun bank sudah tutup.

Bagaimana dengan *mudroom*? *Mudroom* jenis dari *vestibul*, namun jika posisi *vestibule* di depan rumah, maka lokasi *mudroom* berada di samping



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

belakang rumah dekat area servis dan memiliki lemari penyimpanan untuk pakaian luar. *Mudroom* dapat lebih besar dari *foyer* dan berfungsi sebagai tempat di mana

anggota keluarga atau tamu dapat melepas pakaian luar yang kotor atau basah sebelum memasuki bagian utama rumah. *Mudroom* memiliki lantai yang



mudah dibersihkan, juga sering kali dilengkapi mesin cuci dan pengering. Ruangan ini umumnya ada pada rumah di negara 4 musim dengan cuaca ekstrem.

Jika *foyer*, *mudroom*, dan *vestibule* tampak seperti ruangan karena memang didedikasikan untuk tujuan spesifik. Maka *entryway* lebih seperti jalur sirkulasi atau lorong yang panjang setelah pintu masuk. Dipercantik dan dimanfaatkan sebagai area transisi setelah memasuki rumah sehingga sering kali ditambahkan *furnishing* seperti meja konsol dan cermin.

 **anandanararya**

TOD Jadi Tren Hunian Perkotaan

KENAIKAN harga BBM diperkirakan akan menambah inflasi sebesar 1,8% dan membuat biaya hidup ikut membengkak. Terlebih bagi masyarakat yang bermukim di luar pusat kota. Karenanya hunian berkonsep *transit oriented development* (TOD) digadang-gadang menjadi solusi untuk mengurangi biaya transportasi.

Tak hanya itu, hunian TOD juga diproyeksikan mendukung kualitas hidup masyarakat agar lebih sehat.

Analisis Perekonomian Subbidang Perkeretaapian, Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet, Mayke Kristika Antony Putri mengatakan semakin kompleksnya kemacetan lalu lintas dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan akibat konsumsi BBM secara berlebih memerlukan solusi konkret yang dapat meminimalkan ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan pemanfaatan transportasi publik.

"Salah satu solusinya adalah merancang pembangunan kawasan berbasis *transit oriented development* (TOD). Konsep TOD mengintegrasikan desain ruang kota untuk menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik melalui konektivitas yang mudah dengan berjalan kaki ataupun bersepeda serta terintegrasi dengan transportasi publik ke seluruh kota," kata Mayke.

Merujuk pada Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan



ISTIMEWA

Berorientasi Transit, Mayke mengatakan konsep kawasan TOD merupakan perancangan kota yang berkelanjutan untuk masyarakat dan dapat menjadi salah satu alternatif perancangan kota untuk pertumbuhan perekonomian daerah karena menggabungkan area hunian dengan komersial.

"Perkembangan kota yang berorientasi TOD berpotensi untuk mengurangi biaya transportasi rumah tangga dan mengatasi permasalahan lingkungan," jelas Mayke.

Prinsip TOD menempatkan sarana komersial, permukiman, perkantoran, fasum dan fasos dalam jarak tempuh yang dekat. Beberapa negara di Amerika Latin, Jepang, Hong Kong, dan Singapura sudah menerapkan konsep hunian TOD.

Institute for Transportation and Development Policy (ITDP)

menjelaskan konsep TOD memiliki sejumlah manfaat seperti meningkatkan angka pemakaian transportasi publik sehingga tingkat kemacetan menurun karena jumlah kendaraan tidak lagi melebihi kapasitas jalan sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan karena penggunaan bahan bakar dan emisi berkurang.

Dalam TOD Forum, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Jakarta layak disebut sebagai pelopor kawasan berorientasi transit karena kebutuhan Jakarta dalam mengantisipasi kemacetan melalui perbaikan infrastruktur transportasi, adaptasi perubahan iklim melalui penerapan *low emission zone*, dan penguatan dan perbaikan tata ruang/ tata bangunan melalui urban *regeneration* dengan integrasi hunian, tempat kerja, dan ruang sosial. Adapun Wakil Gubernur

DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menambahkan konsep TOD akan bernilai positif dan mendorong pendapatan daerah jika disertai pengembangan hunian terjangkau di kawasan TOD, karena akan mendorong terwujudnya budaya baru, yaitu budaya berjalan kaki, budaya transit, dan budaya yang membuka simpul-simpul di masyarakat.

Hal positif lainnya juga disampaikan oleh Monica Koesnovagril, Director Advisor Services Colliers Indonesia. Hunian TOD yang terintegrasi dengan infrastruktur transportasi seperti MRT, LRT, KRL membuat penghuninya bisa menghemat banyak waktu sehingga bisa memanfaatkan waktu yang biasanya habis di jalan untuk hal-hal yang lebih baik, seperti berkumpul bersama keluarga dan teman.

 **antonc**

Pembentukan DKN Dinilai Tak Diperlukan

RENCANA pembentukan Dewan Keamanan Nasional (DKN) yang kembali mencuat seiring dengan adanya surat yang dikirimkan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Agustus 2022 terkait perubahan Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional mendapat respon beragam.

Dosen Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sri Yunanto, menilai, perubahan tersebut tidak diperlukan dan tidak relevan. Dia menilai, kondisi dan kinerja lembaga-lembaga di bidang keamanan saat ini sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari kondisi keamanan dan ketertiban maupun dalam

hal respons lembaga keamanan dalam merespons sejumlah masalah dan ancaman. "Indikator keamanan kita saat ini kan baik-baik saja. Coba kita lihat dari national security, misalnya masalah Laut China Selatan, ya parsial *aja* sudah dihadapi dengan baik. Begitu juga masalah terorisme, kan juga ditangani dengan baik. Artinya, negara saat ini baik-baik saja tanpa adanya DKN. Maka sebaiknya ini jangan diubah dulu. Lebih baik optimalkan saja yang sudah ada," kata Sri Yunanto dalam

keterangan tertulisnya kemarin.

Indikator keamanan yang bagus juga bisa dilihat dalam masalah ketertiban masyarakat maupun penanganan keamanan dalam bidang sosial politik. Tidak hanya itu, dalam merespons berbagai tantangan kedaruratan, lembaga-lembaga yang ada saat ini juga sudah baik. Misalnya darurat bencana maupun darurat pandemi Covid-19, semua tertangani dengan baik.

"Jadi, kalau semua sudah berjalan dengan baik, tidak diperlukan lagi lembaga baru seperti DKN. Apalagi, lembaga ini akan merombak tatanan kelembagaan yang sudah ada saat ini," tegasnya.

Menurut Sri Yunanto, DKN tidak diperlukan karena fungsi-fungsi dasarnya sudah dijalankan dengan baik oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Hukum (Kemkenko Polhukum). Secara substansi, DKN bertujuan untuk menkoordinasi semua lembaga di bidang keamanan dan ketahanan. Saat ini tujuan itu sudah tercapai dengan adanya Kemkenko Polhukum.

"Fungsi-fungsi DKN itu sudah dilakukan, sudah dijalankan oleh Kemkenko Polhukum. Itu sama fungsinya. Semua dikoordinasikan di situ

soal ancaman keamanan dan ketahanan. Nah, kalau fungsi dan tujuan utama sudah tercapai, buat apalagi membentuk DKN? Maka tidak diperlukan dan tidak relevan lagi," paparnya.

Dia menambahkan, Lembaga-lembaga di bidang keamanan dan ketahanan yang ada saat ini dibentuk lewat Undang-Undang. Sementara DKN yang dimaksudkan sebagai lembaga induk, yang mengatur dan mengoordinasi semua lembaga di bidang keamanan dan ketahanan akan dibuat lewat perpres.

"Persoalan DKN itu persoalan strategis. Itu bukan hanya hitung-hitungan sementara. Kalau pun harus dibuat, itu harus lewat UU," tuturnya. Sri Yunanto menilai, untuk memperbaiki masalah keamanan dan ketahanan, bukan dengan membentuk lembaga baru, melainkan dengan mengoptimalkan lembaga yang sudah ada.

"Kondisi keamanan saat ini sudah baik dan kinerja lembaga-lembaga dalam bidang keamanan dan ketahanan juga sudah baik. Jadi tidak lagi perlu lembaga baru. Tinggal dioptimalkan saja lembaga dan kinerja yang sudah berjalan saat ini," katanya.

 **antonc**



Informasi Pemasangan Iklan Hubungi: 0819-9090-0919

KEHILANGAN

Hilang BPKB Spd. Motor Nopol B68265BL, Noka MH33KA0144 K681736, Nosing 3KA655962, A.n. Raihan Teguh Pratama

KEHILANGAN

Hilang BPKB No.Pol: B 2942 FVI, Honda Mobilio, Abu Metalik, 2016, No.Sin: L15Z12426475, No.Ra: MHRD D4850G605390, A/N: Adi Prasetyo



Info...
Informasian
Bisnis Anda
dalam Iklan
Baris dan
Kolom